

Menapaki Demokrasi dalam Sistem Protestan di Amerika Serikat

Lusi Handayani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
lusehandayani@gmail.com

Suggested Citation:

Handayani, Lusi. (2022). Menapaki Demokrasi dalam Sistem Protestan di Amerika Serikat. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 1: pp 139–144. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i1.16902>

Article's History:

Received February 2022; Revised February 2022; Accepted February 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This study describes the dynamics of the development of the democratic system in Protestants. This study takes the writings of Paul Freston in a book entitled Religion and Politics. The method used in this research is qualitative, with library research involving books and other references related to the research topic. Data analysis was done by the comparative method. In this study, it is found that the development of Western democracy is indebted to the Protestant system in the past. This study also explains that America is one of the countries that is still developing the principles of democracy liberally. Still, the role of Protestants is getting less and less visible due to competition between churches and differences in interests in society. The political system that teaches interests above all else has changed the order of Protestant democracy taught in the Bible system as discussed in this study. Pure democratic values are no longer implemented. This is in line with the writings of Paul Freston and the discovery of information in reference sources.

Keywords: public interest; global politics; Bible; liberalism; collective decision

Abstrak:

Penelitian ini menguraikan dinamika perkembangan sistem demokrasi pada umat Protestan. Kajian ini mengambil tulisan dari Paul Freston yang ada di dalam buku yang berjudul *Religion and Politics*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan melibatkan buku-buku dan referensi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode komparatif. Dalam penelitian ini ditemukan sebuah realitas bahwa perkembangan demokrasi Barat berhutang budi pada sistem Protestan pada masa lalu. Penelitian ini pun memberikan penjelasan bahwa Amerika salah satu negara yang masih mengembangkan prinsip demokrasi secara liberal, namun peranan dari kalangan Protestan makin hari makin tidak terlihat diakibatkan karena adanya persaingan antar Gereja dan juga perbedaan kepentingan di masyarakat. Sistem politik yang mengajarkan kepentingan di atas segalanya, telah mengubah tatanan demokrasi Protestan yang diajarkan dalam sistem Al-Kitab sebagaimana yang dibahas dalam kajian ini. Nilai-nilai murni demokrasi tidak lagi dijalankan. Ini sejalan dengan tulisan Paul Freston dan penemuan informasi-informasi dalam sumber-sumber rujukan.

Kata Kunci: kepentingan masyarakat; politik global; Al-Kitab; liberalisme; keputusan kolektif

PENDAHULUAN

Secara harfiah demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat (Rahman, 2016). Dalam hal ini rakyat memiliki hak untuk memerintah. Kata demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* adalah rakyat,

kratos atau *kretein* adalah kekuasaan atau berkuasa. Menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (Ali- Fauzi et al., 2019).

Demokrasi merupakan bagian dari sebuah sistem yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan keputusan bersama (Rahman & Setia, 2021). Hal tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan adanya kesepakatan dan keinginan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil anggota-anggota atau masyarakat pada sebuah kelompok atau sebuah negara (Wibisono, 2020). Antara individu dalam masyarakat mempunyai status yang sama di mata sistem demokrasi. Hal tersebut sebagai sebuah bukti bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hasil kolektif merupakan sistem yang memberikan kontrol terhadap pemerintah ataupun sebuah sistem pemerintahan (Mubarak & Rahman, 2021; Setia, 2021).

Sistem sebuah demokrasi melibatkan banyak unsur di dalamnya (Watts et al., 2021). Antara lain adalah aturan-aturan yang mengikat di sebuah sistem pemerintahan, kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan ataupun masyarakat secara luas. Demokrasi merupakan sistem yang pandangan mutlak tertinggi adalah rakyat. Dalam pelaksanaannya pun dikontrol oleh rakyat. Pihak-pihak yang ditunjuk untuk mewakili rakyat merupakan utusan yang bertugas mengemban amanah rakyat. Sistem seperti ini menandakan adanya hubungan sinergis antara rakyat dan para penguasa untuk meninjau sejauh mana sebuah kebijakan bisa diaplikasikan dengan mempertimbangkan hak-hak pada setiap sisinya (Centeno, 2021).

Sebagai sistem politik global, demokrasi menjadi sistem yang dianut oleh mayoritas masyarakat dunia (Rahman, 2021). Namun tidak jarang menjadi permasalahan saat dihadapkan pada persoalan lokal yang menguat menjadi sebuah identitas. Masyarakat pada akhirnya melebur menjadi kelompok-kelompok baik secara agama dan cenderung mempunyai nilai-nilai fundamentalis pada setiap agama tersebut (Dahl, 2020).

Dalam agama Protestan contohnya, Agama Kristen Protestan merupakan agama besar dunia yang menyatakan bahwa iman harus menjadi bagian pengalaman sebagai karya dari Roh Kudus (Tjalve, 2021). Orang-orang Protestan cenderung menganggap hal tersebut sebagai hal yang bersifat umum. Terjadi di kalangan umatnya dimanapun berada. Sehingga bentuk reformasi terjadi dalam tubuh protestan sendiri sebagai sebuah sistem yang mengedepankan sistem demokrasi.

Secara historis Protestan menginginkan adanya reformasi pada sistem ibadah dan hierarki Gereja Anglikan, serta menginginkan adanya sebuah ritus sederhana dalam sebuah agama yang menjadikan konsep ibadah cenderung lebih intim dan merupakan sesuatu yang langsung dikerjakan oleh penganutnya terhadap Tuhan. Perkembangan Protestan di Inggris yang berusaha memurnikan nilai Al-Kitab mendapatkan tantangan. Ratu Elizabeth I yang merasa tidak suka terhadap kaum Puritan, memberikan pandangan bahwa ritual-ritual yang dilaksanakan Puritan pada waktu itu terlalu demokratis dan bertentangan dengan konsep absolutisme kerajaan. Ibadah yang dijalankan Puritan diantaranya adalah berkumpul dan berdoa dengan menjunjung tinggi keshalehan (Hien & Wolkenstein, 2021).

Ratu Elizabeth I sendiri beragama Protestan. Dia mengubah ajaran dan tata cara pelaksanaan upacara keagamaan Protestan. Ini jelas mendapatkan protes dari kaum Puritan. Karena pada pelaksanaan upacara keagamaan yang dilaksanakan kerajaan mengedepankan kehidupan hedonis dengan tata cara keagamaan yang tidak merakyat. Kaum Puritan menganggap ini sebagai bentuk pemenuhan kebebasan dalam upacara keagamaan yang mereka sudah sederhanakan dalam sebuah ritus Protestan, sehingga konsep demokrasi keagamaan menjadi kabur (Nelson, 2021).

Dalam perkembangannya, Kaum Puritan adalah kaum yang diburu kerajaan dan pada akhirnya Puritan ini keluar Inggris untuk mencari tempat baru. Konsep demokrasi yang mereka tanamkan dalam bentuk agama menjadi sebuah semangat dalam menyebarkan semangat pemurnian Kristen yang punya nilai signifikansi. Namun berdasarkan beberapa tulisan, kemajuan kristen protestan di dunia dan katolik akhir-akhir ini menjadi sangat merosot. Dilihat dari keikutsertaan kaum protestan dalam politik global. Ini menjadi sorotan terutama di Amerika yang melihat perkembangan Protestan terhadap politik global mengalami situasi yang regresif (Guth, 2021). Berbanding terbalik dengan semangat fundamentalis Protestan yang dahulu menjadi sebuah keterbukaan dan sistem terbuka untuk menjadikan sebuah ritus agama dikemas menjadi murni dan bisa dinikmati oleh segenap masyarakat secara luas.

METODE

Dalam tulisan ini, metode yang digunakan adalah *comparative method*, yaitu penelitian untuk mengamati permasalahan yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta dan sifat dari objek kajian lainnya (Mustari & Rahman, 2012). Dalam mengumpulkan data, dilakukan studi kepustakaan yang disebut *library research*

(Silverman, 2015). Adapun data dan informasi yang ada pada tulisan ini diambil dari buku-buku, jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan konsep demokrasi pada sebuah sistem agama Protestan yang menjadi kajian dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ajaran Demokrasi dalam Protestan

Ajaran demokrasi meskipun tidak secara langsung diajarkan dalam sistem Al-Kitab, namun di dalam ajaran Al-Kitab banyak sekali nilai-nilai yang menggambarkan sistem demokratis (Marsden, 2006). Diantaranya dalam Al-Kitab dijelaskan sangatlah penting dalam mengajarkan ketaatan dan ketertiban dalam menggunakan hak dan kewajiban. Seperti membayar pajak, membudayakan persatuan dan kesatuan, saling terbuka dalam dan menerima saran dan kritik, serta menjunjung tinggi konsep perdamaian. Dari hal tersebut bisa jelas terlihat bahwa secara tidak langsung, konsep demokrasi menjadi salah satu ajaran yang dicontohkan dalam Al-Kitab. Dari hal tersebut bisa dipastikan bahwa seorang Protestan wajib menerapkan sistem demokrasi dalam setiap perlindungan hak asasi manusia ataupun keberagaman.

Dalam sistem demokorasi, Gereja seharusnya dipersiapkan untuk melihat fenomena dan dinamika politik. Anggota atau jemaat yang diharapkan melek terhadap arus politik supaya bisa mengkritisi kebijakan yang benar atau salah. Bersikap pro aktif salah satu misi dalam kehidupan umat Protestan, karena jemaatnya merupakan bagian dari tatanan kemasyarakatan dan kebangsaan. Demokrasi adalah sistim politik dimana rakyat bertugas untuk memilih dalam menentukan siapa-siapa yang bertugas menempati jabatan penting (Cremer, 2021).

Ayat-ayat Al-Kitab mempengaruhi lahirnya demokrasi. Sudah sejak lama buku ini menjadi kontroversi. Al-kitab mengajarkan Protestan mengsihi sesama dengan sistem moral yang berlaku. Gagasan Protestan lainnya yang diberikan mengenai ide demokrasi adalah ide tentang kasih kepada sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Penjelasan ini yang secara terang-terangan diinformasikan dan disebarluaskan di dunia Barat sebagai jalan kehidupan yang meresap ke demokrasi. Penganut protestan pada akhirnya berjuang di Barat untuk menghapuskan perbudakan, perjuangan hak pilih perempuan serta hak-hak sipil lainnya. Alkitab banyak menceritakan pemerintahan, banyak cerita baik raja ataupun kehidupan parlementer. Dari awal penciptaan, dominion itu sudah diatur, baik untuk alam maupun semua yang merayap di dalamnya sampai kepada bagaimana menata manusia dalam jaman keluaran (Marsden, 1984).

Demokrasi yang pertama bersifat sangat terbatas. Terjadi di pemerintahan Yunani. Dilanjutkan oleh bangsa Romawi yang mengembangkan prinsip-prinsip dasar hukum yang tertulis. Protestan memberikan semangat kebebasan dalam beribadah dan tidak terkekang oleh prinsip aturan gereja yang ortodoks. Ini menjadi semangat dalam menumbuhkan cikal bakal demokrasi dikehidupan selanjutnya (Minkenberg, 2018).

Dasar kepercayaan pertama yang protestan kembangkan dalam sistem demokrasi adalah penciptaan alam semesta dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia satu derajat yang sama. Konsep universal mengenai persamaan derajat mempunyai arti bahwa dalam kehidupan persamaan adalah salah satu indikator dalam konsep hak. Protestan diharapkan bisa melahirkan institusi-institusi dalam melakukan kegiatan demokratis. Seperti halnya ketika perpindahan kaum Puritan ke Amerika, diharapkan bisa menadi gerbang dan kunci dalam melahirkan konsep demokratis dalam masyarakat (Allitt, 2003).

Sikap Orang Protestan terhadap Demokrasi

Dasar-dasar yang harus dimiliki penganut Protestan terhadap demokrasi, seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah memiliki sikap terbuka. Sikap pengakuan terhadap sebuah kondisi yang dikuasai oleh mayoritas dan saling menghormati bagi kaum minoritas (Daniel, 2018). Dalam hal ini, orang Protestan diharuskan bersikap kritis meskipun adanya kaum mayoritas di dalam sebuah sistem kemasyarakatan. Umat Protestan tidak hanya hadir sebagai kaum yang mempunyai identitas agama. Jika merujuk pada konsep Al-Kitab yang sudah dijelaskan, secara terang benderang persamaan hak serta adanya sikap keterbukaan menjadi kunci keikutsertaan Protestan dalam fenomena demokrasi (Airhart, 1992).

Menurut tulisan Paul Freston (2021), dijelaskan bahwa Protestan menjadi penyumbang konsep terbesar di Barat dalam dinamika demokrasi. Paling tidak sikap yang harus dimiliki umat Protestan tetap mempertahankan budaya terbuka dan saling menghargai satu sama lain dalam prinsip hidup mereka. Maka tidak jarang pada kajian Paul Freston, Protestan sering kali menjadi pemicu adanya sebuah gerakan-gerakan sosial dalam masyarakat. Sebagaimana sikap fundamentalis protestan yang menjadi semangat untuk mereformasi gereja pada masa lalu.

Perkembangan Konsep Demokrasi pada Umat Protestan di Amerika Serikat

Salah satu hutang Bangsa Amerika terhadap Protestan adalah sistem demokratis. Terdapat tiga golongan Protestan di Amerika yakni Protestan Evangelis, Protestan arus utama dan Protestan kulit hitam (Guth, 2021). Gerejaanya pun dibedakan berdasarkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada di sana. Misalnya keanggotaan Gereja Protestan dikelompokkan ke dalam tradisi yang religius berdasarkan denominasi bersifat khusus. kemudian seluruh anggota *The Southern Baptist Convention* yang diklasifikasikan sebagai anggota dari gereja Protestan Evangelis (Roach, 2021); mereka yang menjadi anggota *The American Baptist Churches* di AS diklasifikasikan sebagai anggota gereja Protestan arus utama; dan mereka yang menjadi anggota *The National Baptist Churches* diklasifikasikan sebagai anggota gereja Protestan yang kulit hitam (McDaniels Sr, 2021).

Negara Amerika merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan sangat berpegang teguh pada prinsip liberal (Azwar, 2007). Kedatangan kaum Puritan di masa lalu menjadikan Amerika mempunyai warna tersendiri, terlebih melihat perkembangan demokrasi di negara tersebut. Tidak jarang terjadi konflik dan tidak jarang pula antara gereja mempunyai prinsip yang berbeda (Marsden, 1996). Representasi proses demokrasi menghadirkan banyak sekali kesempatan berkembangnya kaum agamawan menjadi aktif ikut serta dalam manifestasi politik di Amerika Serikat. Fenomena yang disebut sebagai politik agama seperti ini sangat menarik perhatian masyarakat di Amerika Serikat. Awal abad ke 20 menjadi awal gerakan Protestan dalam merespon konsep liberalisme serta sekularisme yang terjadi di Amerika Serikat (Cremer, 2021).

Keikutsertaan kaum Protestan dalam kancah politik Amerika sangatlah aktif. Mereka yang sering menamakan kaum fundamentalis, ramai-ramai menjadi pendukung elite politik yang berkuasa dengan menanamkan sikap demokrasi yang berasas liberal. Tidak jarang dalam sistem politiknya pun mereka berkoalisi dengan Yahudi ataupun dengan Katolik yang ada di sana (Freston, 2021). Pada tahun 1988 ketika H.W Bush kalah dalam pemilu, gerakan Protestan menjadi garda terdepan dalam membangun opini publik dan menyebarkan doktrin kekristenan. Pat Robertson sebagai tokoh fundamentalis protestan meyakini bahwa masa depan Amerika Serikat akan dikuasi oleh kaum Protestan (Nelson, 2021).

Pada tahun 2000, *The Washington Post* memuat berita bahwa Christian Coalition yang menjadi perwakilan kalangan Protestan dinyatakan menurun. Ini terlihat dari adanya permasalahan pajak dan menurunnya pendapatan (Minkenberg, 2018). Akan tetapi, kehidupan politik partai republik semakin meningkat karena Christian Coalition dikalahkan oleh 15 juta suara kaum protestan secara murni, dan berhasil mendukung George H.W bush menjadi presiden. Setelah Bush menjadi Presiden, yang mendapat perlakuan istimewa adalah gereja Evangelis yang mendukungnya secara penuh. Kaum Protestan di Amerika dianggap mewarnai kehidupan demokrasi yang beragam di Amerika Serikat.

Namun hal ini menuai kritik dari Paul Freston yang mengurai sejarah protestan dan kebangkitan protestan dalam memulai sistem demokrasi (Freston, 2021). Pada saat ini keberadaan kaum protestan terdiktomi oleh perbedaan mazhab gereja di setiap wilayahnya terutama di Amerika Serikat. Kepentingan menjadi salah satu unsur yang tidak bisa dihindarkan (Mattes, 2018). Bahkan tulisannya menyebut Protestan tidak lagi aktif dalam memberikan kemajuan demokrasi. Bahkan dalam kehidupan politik, konsep demokrasi dan pelaksanaan keikutsertaan aktif dalam masyarakat demokrasi hanya terjadi di Amerika. Di negara lain tidak menunjukkan adanya keterlibatan protestan dalam sistem pemerintahan (Tjalve, 2021).

Prinsip teologis yang pada akhirnya dicampurkan dengan kepentingan politik menjadi sangat kabur. Keberadaan demokrasi sebagai asas yang mendukung keterbukaan, pada saat ini sangat melebur di sistem Protestan sendiri. Meskipun sejarah mencatat bahwa Barat berhutang kepada Protestan mengenai sistem demokrasi, namun perkembangan demokrasi yang terjadi di Protestan saat ini perlu dibenahi pada tingkatan-tingkatan hierarkisnya.

KESIMPULAN

Konsep demokrasi dalam Protestan merupakan gagasan keterbukaan dan pengakuan terhadap segala bentuk hak-hak dan kewajiban umat manusia. Gagasan ini semakin berkembang seiring dengan landasan historis yang mereka tinggalkan dalam mereformasi gereja sebagai bentuk aturan yang mengekang. Kaum Puritan menjadi penyemangat adanya sistem demokrasi yang diajarkan dalam Al-Kitab. Perkembangan demokrasi pun dikritik oleh Paul Freston saat mengkomparasi para sarjana Katolik dan Protestan di Amerika. Ajaran Protestan dan keikutsertaan para penganut Protestan hanya terjadi di Amerika Serikat saja, meskipun dengan

perkembangan yang lambat laun menunjukkan hal yang menurun. Konsep politik menjadi dasar yang dikultuskan tanpa melihat kepentingan-kepentingan lain di dalamnya. Ajaran keterbukaan dan saling menghormati pada akhirnya hanya menjadi tulisan dalam sistem demokrasi di tataran sistem Protestan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Airhart, P. D. (1992). Marsden, George M., "Understanding Fundamentalism and Evangelicalism"(Book Review). *Church History*, 61(4), 436.
- Ali- Fauzi, I., Rafsadie, I., Nusahid, A., Indra Astuti, S., Kartika, D. A., Mulyartono, S., & Khairil, M. (2019). *Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).
- Allitt, P. (2003). *Religion in America since 1945*. Columbia University Press.
- Azwar, N. (2007). Fundamentalisme dalam Konflik Agama. *Id.Shvoong. Com*.
- Centeno, M. A. (2021). Democracy within reason. In *Democracy Within Reason*. Penn State University Press.
- Cremer, T. (2021). Nations under God: How Church–State Relations Shape Christian Responses to Right-Wing Populism in Germany and the United States. *Religions*, 12(4), 254.
- Dahl, R. A. (2020). *On democracy*. Yale university press.
- Daniel, J. E. (2018). *Covenant and civil society: the constitutional matrix of modern democracy*. Routledge.
- Freston, P. (2021). *A Gospel for the Poor: Global Social Christianity and the Latin American Evangelical Left*, by David C. Kirkpatrick, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2019, 244 pp., US \$55.00 (hb), ISBN 9780812250947. Taylor & Francis.
- Guth, J. (2021). Protestant Clergy and Christian Nationalism. *Perspectives in Religious Studies*, 48(2), 135–147.
- Hien, J., & Wolkenstein, F. (2021). Where Does Europe End? Christian Democracy and the Expansion of Europe. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 59(6), 1623–1639.
- Marsden, G. M. (1984). Understanding fundamentalist views of science. *Science and Creationism*, 98.
- Marsden, G. M. (1996). Agama dan Budaya Amerika. *Jakarta: Sinar Harapan*.
- Marsden, G. M. (2006). *Fundamentalism and American culture*. Oxford University Press.
- Mattes, M. (2018). Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy: A Different Protestant Ethic by Robert H. Nelson. *Lutheran Quarterly*, 32(2), 238–240.
- McDaniels Sr, L. (2021). *Redemption and Recovery in the African American Baptist Church*. Berkeley School of Theology.
- Minkenbergh, M. (2018). Between Christian and multicultural democracy: religious legacies and minority politics. *West European Politics*, 41(1), 53–79.
- Mubarak, M. F. Z., & Rahman, M. T. (2021). Membandingkan Konsep Islam Keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam Kerangka Pluralisme. *Hindu*, 1, 0–4.
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Nelson, P. J. (2021). Global Religions and National Politics. In *Religious Voices in the Politics of International Development* (pp. 125–148). Springer.
- Rahman, M. T. (2016). Islam As An Ideal Modern Social System: A Study of Ali Shariati's Thought. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 42–51.
- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.12269>
- Roach, D. (2021). *The Southern Baptist Convention & Civil Rights, 1954-1995: Conservative Theology*,

Segregation, and Change (Vol. 22). Wipf and Stock Publishers.

Setia, P. (2021). Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial. *Journal of Society and Development*, 1(2), 33–45.

Silverman, D. (2015). *Interpreting Qualitative Data*. Sage Publications.

Tjalve, V. S. (2021). Judeo-Christian democracy and the Transatlantic Right: Travels of a contested civilizational imaginary. *New Perspectives*, 29(4), 332–348.

Watts, D. J., Rothschild, D. M., & Mobius, M. (2021). Measuring the news and its impact on democracy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(15).

Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi Agama*. Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).